



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Juli 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga Bulan Juni Tahun 2020)
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 22 (dua puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (dua puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C. Kepala BKN D. Ketua KASN

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN, dan Ketua KASN, dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020), hari Senin, 6 Juli 2020, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN, dan Ketua KASN menyampaikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI pada Raker/RDP dengan Menpan RB, BKN, dan KASN tanggal 23 Juni 2020, adapun isunya sebagai berikut:

- a. **New Normal dan Work From Home (WFH):** Kebijakan Menteri PAN RB tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru, yaitu pelaksanaan tugas kedinasan dengan pengaturan kerja secara fleksibel (*Flexible Working Arrangement*) dengan memperhatikan protokol kesehatan, PPK mengatur jadwal kedinasan WFH/WFO secara bergantian, rapat diselenggarakan dengan menjaga jarak aman, dan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dilakukan secara selektif.
- b. Dikarenakan **Pandemi Covid-19**, terhadap Anggaran 2020 terdapat Dampak Penghematan/Penyesuaian Belanja K/L T.A. 2020.
- c. **Penyederhanaan Reformasi Birokrasi** sesuai arahan presiden.
- d. Peningkatan **Tenaga Honororer**
- e. **Seleksi CPNS**, perencanaan ASN menyesuaikan arah pembangunan nasional dan potensi daerah dan *core business* instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- f. **THR** untuk staf ahli dan tenaga ahli DPR RI
- g. Kelembagaan
- h. Manajemen Kepegawaian
- i. Jaminan Pensiun
- j. Grand Design Reformasi Birokrasi
- k. Keamanan Platform Digital
- l. Kinerja ASN
- m. Netralitas ASN
- n. Peningkatan Investasi

## III. KESIMPULAN RAPAT

1. Dalam rangka menjaga produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa pandemi Covid-19, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) meningkatkan sistem pengawasan dan menerapkan sistem penilaian kinerja ASN yang disesuaikan dengan pelaksanaan *Work From Home (WFH)* guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.
2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB dan BKN melakukan optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah, serta meningkatkan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada saat penerapan WFH selama masa pandemi Covid-19.

3. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dan BKN melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan luas dan kualitas jaringan internet dan layanan *video/web conference* yang memiliki sistem keamanan tinggi agar data dan informasi pemerintah dapat terlindungi dari ancaman *hacker* atau kejahatan *cyber* lainnya.
4. Terkait 51.293 orang tenaga honorer kategori II yang telah lulus dalam seleksi PPPK tahun 2019, Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Tunjangan PPPK agar proses pengangkatan dan penggajian dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien dengan berlandaskan sistem merit, Komisi II DPR RI mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meningkatkan pengawasan serta pembinaan penerapan sistem merit dan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota yang dalam Indeks Kepatuhan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Merit baru mencapai 0.39%.
6. Terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi II DPR RI meminta KASN dan BKN untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitas ASN, serta penegakan sanksi yang tegas mengingat terdapat potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 6 Juli 2020

KETUA RAPAT



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG**

A-270